



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD DJUNAIDI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SYARIAH
3. NHK : 970449

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.209.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 252.500.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah Seluas 1.764 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 205.500.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 351.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	237.100.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.100.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
3. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.903.969
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.515.503.969



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.515.503.969

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.